

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Fenomena politik kekerabatan dapat dikatakan semakin meningkat, baik dalam jabatan politik di lembaga legislatif (DPRD/DPR/DPD) maupun dalam jabatan eksekutif sebagai Kelapa Daerah. Politik kekerabatan itu sendiri terjadi baik pada tingkat nasional maupun lokal. Pada tingkat lokal, terdapat beberapa fenomena politik kekerabatan seperti di Banten, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Indramayu, Bantul, Lampung, Kutai Kartanegara, dan Bali. Fenomena politik kekerabatan sebenarnya bukan hanya terjadi di Indonesia, namun juga di negara-negara lain seperti Filipina, Srilanka, Thailand, bahkan di negara-negara maju seperti Belgia dan Amerika Serikat. Dalam penelitiannya Stephen Hess menyatakan bahwa di Amerika Serikat terdapat 22 dinasti politik (dalam Kurtz II 1989). Di Indonesia, politik kekerabatan menjadi problematik sehingga Undang-Undang nomor 8 tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota melarang keluarga petahana untuk mencalonkan diri. Mengapa fenomena politik kekerabatan berkembang di Indonesia? Apakah politik kekerabatan berkembang karena adanya pewarisan ketertarikan politik ataukah karena pragmatisme politik? Apakah kandidat dari keluarga politik hanya mengandalkan popularitas keluarga dan tidak disertai dengan kualitas yang memadai?

Ada beberapa penelitian yang telah dilakukan dalam kajian politik kekerabatan yang sebagian besarnya mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi berkembangnya politik kekerabatan dan kompetisi keluarga politik dalam pemilu. Penelitian yang dilakukan oleh Dal Bo dkk (2006) mengenai politik kekerabatan di Amerika Serikat maupun Pablo Querubin (2011) dan Mendoza et.al (2012) mengenai politik kekerabatan di Filipina menunjukkan hasil yang sama, yaitu bahwa kandidat yang berasal dari keluarga politik mempunyai peluang yang lebih besar untuk memenangkan pemilu. Hasil penelitian Dal Bo dkk menunjukkan bahwa seorang legislator yang kerabatnya telah menduduki jabatan politik cenderung mempunyai peluang yang lebih besar untuk terpilih. Dengan kata lain, seseorang yang berkuasa, mempunyai peluang yang lebih besar untuk mempertahankan kekuasaannya dan lebih memungkinkan untuk membentuk dinasti politik. Hal ini disebabkan karena political capital yang terkait dengan mesin politik dapat diwariskan dalam keluarga. Oleh karena itu, fenomena politik kekerabatan tetap bertahan sampai saat ini.

Daniel Markham Smith (2012) juga melakukan penelitian dinasti di Jepang yang menganalisis pengaruh sistem pemilu terhadap dinasti politik. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sistem pemilu yang berfokus pada kandidat (candidate centered elections) menguntungkan keluarga politik karena kandidat dari keluarga politik lebih dikenal oleh publik. Hasil penelitiannya juga menunjukkan bahwa politik dinasti justru berkembang pada era demokratisasi karena keunggulan incumbent, desentralisasi dalam rekrutmen, dan sistem pemilu yang berpusat pada kandidat.

Sementara itu, kajian politik kekerabatan di Indonesia belum banyak dilakukan. Salah satunya adalah yang dilakukan oleh Syarif Hidayat (dalam Nordholt dan Klinken 2007). Namun studi tersebut lebih menyoroti kuatnya politik lokal di Banten dari perspektif shadow state dan ekonomi politik. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kuatnya politik lokal di Banten terjadi karena pergeseran interaksi antara state dan society, terutama pada interaksi local state actors (elite pemerintahan lokal) dan societal actors (jawara-pengusaha) dan terjadi shadow state dengan peran Tuan Besar. Andi Faisal Bakti (dalam Nordholt dan Klinken 2007) dalam penelitiannya mengenai kekuasaan keluarga di Wajo Sulawesi Selatan menyimpulkan bahwa desentralisasi dan otonomi daerah telah memperkuat pemerintahan otokratis. Meskipun penelitian-penelitian tersebut mengkaji elite politik, namun terkait dengan kajian politik kekerabatan. Wasisto Raharjo Djati (2013) yang meneliti familisme dalam demokrasi lokal menunjukkan bahwa familisme dipengaruhi oleh berbagai sumber politik seperti populisme, tribalisme dan feodalisme yang ketiganya membentuk tipologi rezim dinasti politik yang berbeda di Indonesia. Menurut Wasisto, karakter dinasti politik di Sulawesi Selatan adalah tribalism dynasties yang terbentuk dari reproduksi ritus-ritus budaya etnis, ikatan primordialisme, klan politik, dan stratifikasi sosial.

Sekber Golongan Karya dalam eksistensinya pada masa orde lama, dipelopori oleh Soekarno, sebagai barisan dan basis golongan-golongan fungsional yang terhimpun didalamnya dan berdiri pada tahun 1964, beriringan di

awal dengan Konsepsi Presiden 7 Februari 1957 yang menggolarakan transisi demokrasi liberal menuju demokrasi terpimpin ala pemerintahan Soekarno. Golongan fungsional ini tumbuh dan berkembang sebagai kekuatan politik baru dan alternatif, baru ketika negara dihadapkan pada krisis masa Kabinet Wilopo, maka dari itu pada 20 Oktober 1964 terbentuklah Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar)¹, yang didukung melalui tiga dominasi golongan fungsional, yaitu : SOKSI, KOSGORO, dan MKGR. Peralihan kekuasaan pemerintahan orde lama dan masuk ke orde baru yang dipimpin dan dikuasai oleh Soeharto sebagai Presiden, mendominasi gerakan politiknya melalui Sekber Golkar, yang kemudian pada pemilu 1971, Golkar memberikan momok politik yang baru dan menjadi pilar utama pemerintahan Soeharto. Menjadi suatu fenomena yang baru ketika kekuatan partai tunggal di Indonesia pada masa orde baru, juga dipengaruhi oleh kekuatan sipil dan militer. Intervensi dua kekuatan tersebut sebagai motor atau penggerak mesin partai yang digunakan oleh Soeharto. Soeharto tidak menjadi pengurus inti dalam Golkar, akan tetapi posisinya sangat berpengaruh di Golkar.

Kekuasaan Soeharto selama 32 tahun akhirnya lengser, dan para pimpinan dan elit di Golkar, mendeklarasikan diri sebagai Partai Golongan Karya². Pada pemilu tahun 1999, Partai Golkar mengalami degradasi suara dan dukungan akibat dari lepasnya unsur militer dan birokrasi sebagai suatu dampak dari Reformasi 1998, sehingga pada pemilihan legislatif tahun 2004 setelah sekian

¹ David Reeve, *GOLKAR: Sejarah Yang Hilang, Akar Pemikiran & Dinamika* (Jakarta: Buku Kita, 2013). Hal 49.

²Ganjar Razuni, "Akar Ideologi Dan Pragmatisme Dalam Partai Golongan Karya Tahun 1998-2019" (Universitas Padjadjaran, 2021). Hal 8.

lama upayakan berbagai strategi politik, Partai Golkar menang dalam pemilihan legislatif.

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), dan strategi Partai Golkar untuk mempertahankan suara dan dukungan masyarakat juga diiringi dengan proses kaderisasi dan rekrutmen oleh gerakan internal partai, untuk mempersiapkan kader-kader terbaik. Pilkada secara langsung sudah diinisiasikan di berbagai daerah di Indonesia, maka revitalisasi sistem Pilkada secara langsung tentu mengalami dinamika yang panjang dan luar biasa, setelah pada tahun 2004 sebagai demokrasi awal yang sangat baru terjadi dalam arena masyarakat, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung, sehingga menetapkan Presiden RI yaitu SBY dan Wakil Presiden RI yaitu Jusuf Kalla (Koalisi Golkar dan Demokrat).

Perkembangan Partai Politik di Indonesia khususnya pasca-reformasi menjadi suatu babak baru dalam transisi demokratisasi. Artinya, dengan sistem kepartaian yang multipartai, dan dengan berbagai azas, dasar pemikiran dan ideologi partai yang dibangun, akan berpengaruh terhadap : dukungan masyarakat terhadap partai; pengaruh suara masyarakat; orientasi masyarakat; sistem kaderisasi dan pendidikan politik internal partai; komunikasi politik partai. Dalam menunjang suara dan dukungan kepada Partai Politik tentunya perlu gerakan-gerakan ke masyarakat dari kader-kader aktif partai, yang kemudian kader tersebut dipersiapkan untuk menunjang pencapaian visi dan misi partai politik. Sistem kaderisasi Partai Politik di Indonesia tentu berbeda-beda, mulai dari : mendirikan sekolah kader yang didalamnya ada proses pengemblengan orientasi

dan ideologi partai; pendidikan dan pelatihan calon kader melalui diskusi-diskusi khusus dan turun lapangan; mempersiapkan materi-materi khusus kepada calon kader partai mulai dari perkembangan dan sejarah partai hingga azas partai sesuai dengan AD/ART.

Mengingat begitu banyaknya kader-kader dari Partai Golongan Karya yang sudah matang dan sangat berpengaruh terhadap perpolitikan nasional, lamban laun ada beberapa kader “siap” yang mampu berpaling dari Golkar, sehingga mendirikan partai-partai baru. Ada juga kader yang berpaling ke partai lain, dan bahkan mengembangkan partai baru, kasusnya seperti kader Golkar sebelumnya yaitu Surya Paloh dengan partai yang dibangunnya yaitu Nasdem, atau seperti Prabowo dengan partai Gerindra. Akan tetapi fenomena ini menjadi suatu pertanyaan kritis, apakah ketika kader partai yang sudah mapan dan keluar dari partai sehingga memiliki ambisi terhadap kekuasaan dan kekuatan nasional, sehingga membentuk partai baru sebagai sebuah pengkhianatan terhadap azas dan ideologi partai? Apakah fenomena ini tentu menjadi bentuk pragmatisme politik kader terhadap ambisi politik yang besar? Maka dari itu, pentingnya kaderisasi yang sangat mendasar, dan mengakar hingga darah dan tulang seorang kader, bagaimana loyalitas dan kemampuan kader untuk menjadi pemimpin kedepan, sehingga mempersiapkan basis massa yang kuat dan mengakar, kemudian tentu dengan berbagai proses strategi politik dalam menghadapi kontestasi dan demokrasi politik masyarakat, yaitu pemilihan umum (Pilpres, Pileg dan Pilkada).

Partai Golkar masih bertahan sangat dinamis dalam kancah perpolitikan nasional, dan penempatan kader-kader tulen Partai Golkar di pemerintah pusat

sangat strategis. Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah, Profesor Azyumardi Azda menyampaikan³, bahwa Partai Golkar masih bertahan dalam proses kaderisasi yang baik, dengan mengundang calon kader pemuda-pemudi untuk ikut serta dalam dunia sosial-politik, ditambah lagi dengan adanya program *Young Political Leaders* yang diselenggarakan oleh Golkar Institute (Sekolah Pemerintahan dan Kebijakan Publik) sebagai wadah calon kader Partai Golkar dalam pendidikan dan pelatihan, yang didalamnya memuat materi mengenai : Sejarah Kepartaian Partai Golkar; Dinamika Pemerintahan Indonesia; Kebijakan Publik; dan *Leadership*.

Di Kabupaten Purwakarta, kader Partai Golkar sudah sangat mengakar, karna pada sejatinya Jawa Barat pada masa orde baru menjadi lumbung suara Partai Golkar yang masif. Kepemimpinan kader Partai Golkar tergambar di Kabupaten Purwakarta, sebagai berikut :

Tabel 1.1 Kepemimpinan Kader Partai GOLKAR di Kab. Purwakarta

Kepemimpinan Kader Partai Golongan Karya di Kabupaten Purwakarta	
Nama	Jabatan
Benyamin Dudih 1993-1998 dan 1998-2003 (2 periode)	Bupati Ke-6
Dedi Mulyadi 2003-2008	Wakil Bupati Ke-7
Dedi Mulyadi 2008-2013 dan 2013-2018 (2 periode)	Bupati Ke-8
Anne Ratna Mustika 2018-2023 (Istri Dedi Mulyadi)	Bupati Ke-9

Sumber : Diolah dari berbagai sumber

³ Edyna Ratna Nurmaya, "Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Sebut Golkar Terbaik Untuk Kaderisasi Partai," Suara Merdeka, 2021, <https://www.suaramerdeka.com/nasional/pr-041498562/guru-besar-uin-syarif-hidayatullah-sebut-golkar-terbaik-untuk-kaderisasi-partai>. Diakses pada 8 April 2023 Pukul 05.35 WIB.

Bupati Ke-6, Benyamin Dudih (1993-2003); Wakil Bupati Ke-7, Dedi Mulyadi (2003-2008); Bupati Ke-8, Dedi Mulyadi (2008-2018); dan Bupati Ke-9, Anne Ratna Mustika (2018-2023)⁴. Akan tetapi, kontestasi Pilkada secara langsung, demokratis dan terbuka di Kabupaten Purwakarta masih sangat baru, terhitung mulai tahun 2008, sejak terpilihnya Dedi Mulyadi sebagai Bupati Kabupaten Purwakarta selama 2 periode, yaitu 2008-2013 dan 2013-2018, bahkan sebelumnya pun sebagai Wakil Bupati dan petahana dalam eksistensinya sebagai aktor dan elit di Purwakarta. Akan tetapi, relasi antara Dedi Mulyadi dengan Anne Ratna sangat erat, karena keduanya adalah suami istri hingga tahun 2023 awal. Pada saat pengusungan Anne Ratna sebagai Calon Kepala Daerah dalam kontestasi Pilkada 2018 di Kabupaten Purwakarta, maka hal ini ada cerminan indikasi “Politik Dinasti” yang kemudian dibangun oleh Dedi Mulyadi. Masyarakat luas dan bahkan partai-partai lain pun mengakui, bahwa Purwakarta adalah ladang suara Golkar melalui kader militan seperti Dedi Mulyadi. Hal ini perlu penulis singgung bagaimana relasi kepala daerah di Purwakarta, karena tetap fokus penelitian ini ialah mengenai sistem kaderisasi yang dibangun oleh Partai Golkar dalam Pilkada tahun 2018, dengan paslon kuat yaitu: Anne Ratna (Golkar) dan Aming (PAN), dan dengan dukungan partai pengusung lainnya yaitu: Demokrat, PKB, Hanura dan Nasdem⁵.

Kaderisasi politik sebagai salah satu fungsi dari Partai Politik dengan tujuan mempersiapkan kader-kader yang aktif, militan, dan siap untuk memimpin

⁴ Disipusda Purwakarta, “Bupati Purwakarta,” n.d., <https://disipusda.purwaktakab.go.id/bupati-purwakarta/>. Diakses pada 8 April 2023 Pukul 01.46 WIB.

⁵ Irwan Nugraha, “Diusung 6 Partai, Istri Dedi Mulyadi Mendaftar Ke KPU Untuk Pilkada Purwakarta,” Kompas.com, n.d.

kemudian hari. Partai Politik sebagai sebuah jembatan kader untuk memberikan loyalitasnya kepada negara dan masyarakat, sehingga dipersiapkan sebagai pemimpin yang memiliki kapabilitas dan kapasitas yang mumpuni, dan mempertahankan loyalitas dan ideologinya sesuai dengan azas partai itu sendiri.

Kaderisasi menurut Koirudin, ialah sebagai sebuah proses persiapan sumber daya manusia yang mampu membangun peran dan fungsinya sebagai seorang kader, sehingga terdapat dua persoalan penting yang fokus kader itu sendiri, yaitu⁶: *Pertama*, bagaimana usaha yang dibangun oleh partai untuk organisasi, dan meningkatkan kemampuan calon kader (*softskill*) dalam mengurus pengadaan pendidikan dan pelatihan politik secara masif dalam bidang tertentu, sesuai dengan tingkat kepengurusan partai; *Kedua*, kemampuan partai untuk menyediakan kader atau SDM organisasi yang berpotensi sehingga kaum muda yang dijadikan sasaran efektif dan berkualitas.

Putra Daerah seperti Dedi Mulyadi dan keluarganya bisa saja menjadi salah satu celah Partai Golkar dalam melakukan proses kaderisasi, dan terbangunnya Politik Dinasti di Purwakarta. Strategi politik pada Pilkada 2018 dengan mengusung Anne Ratna sebagai calon kepala daerah yang kuat tentu sebagai suatu pertahanan kekuasaan. Disisi lain, yang menarik juga adalah Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Purwakarta adalah anak dari Dedi dan Anne, yaitu Maulana Akbar Mulyadi Putra. Suasana Politik Dinasti memang sangat terlihat di Kabupaten Purwakarta khususnya lingkup Partai Golkar. Tentu hal ini sebenarnya

⁶ Miman Nurdiaman et al., “Analisis Proses Kaderisasi Pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Garut,” *Jurnal Ilmu Sosial Politik Dan Humaniora* 2, no. 2 (2019): 27–32, <https://doi.org/10.36624/jisora.v2i2.43>.

menjadi tantangan tersendiri bagi seorang elit seperti Dedi Mulyadi, yang dimana pengaruh KKN akan terjadi akibat dari Politik Dinasti.

Dari uraian diatas, maka penulis sangat tertarik membahas bagaimana Politik Dinasti yang dibangun oleh Dedi Mulyadi melalui Anne Ratna, sehingga Partai Golkar menjadi motor penggerak kekuasaannya dalam mengusung Anne Ratna dan Aming pada Pilkada Kabupaten Purwakarta tahun 2018. Tentunya hal ini dipengaruhi oleh kaderisasi yang dibangun Partai Golongan Karya Purwakarta dalam pemenangan Pilkada, dan faktor-faktor apa yang mendukung politik dinasti di Purwakarta.

1.2 Pertanyaan Penelitian

1. Mengapa terjadi politik dinasti di Kabupaten Purwakarta ?
2. Bagaimana sistem kaderisasi politik Partai Golkar Kabupaten Purwakarta pada Pilkada tahun 2018 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan fokus peneliti untuk memperoleh hasil penelitian yang maksimal guna tepat sasaran dan capaian. Tujuan penelitian dibagi menjadi 2 aspek, tujuan akademik dan tujuan praktis sebagaimana diuraikan berikut :

1.3.1 Tujuan Akademik

- 1) Mengkaji lebih dalam untuk pengembangan ilmu pengetahuan dalam fokus penelitian mengenai upaya membangun politik dinasti dan

bagaimana fungsi kaderisasi Partai Golongan Karya di Kabupaten Purwakarta.

2) Menguraikan hasil penelitian tentang politik dinasti dan bagaimana fungsi kaderisasi Partai Golongan Karya di Kabupaten Purwakarta;

3) Mengetahui faktor-faktor yang mendukung proses kaderisasi yang digunakan Partai Golongan Karya di Purwakarta pada Pilkada 2018, sehingga adanya politik dinasti.

1.3.2 Tujuan Praktis

1) Memperoleh hasil penelitian mengenai politik dinasti dan kaderisasi politik Partai Golkar di Purwakarta;

2) Mengetahui sejauh mana keberhasilan politik pinasti yang telah dibangun, dan sistem kaderisasi Partai Golkar Purwakarta;

3) Mengetahui bagaimana upaya-upaya Partai Golkar dalam membina kader dan respon terhadap politik dinasti yang ada di tubuh Partai Golkar Purwakarta.

1.4 Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian merupakan fokus peneliti untuk memperoleh hasil penelitian yang maksimal guna tepat sasaran dan capaian. Tujuan penelitian dibagi menjadi 2 aspek, tujuan akademik dan tujuan praktis sebagaimana diuraikan berikut :

1.4.1 Manfaat Akademis

1) Memberikan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang kaderisasi partai politik.

- 2) Memberikan gambaran dampak-dampak yang terjadi akibat adanya politik dinasti.

1.4.2 Manfaat Praktis

- 1) Memperoleh hasil penelitian, yang didalamnya terdapat kekurangan dan kelebihan suatu kaderisasi yang didasari dengan politik kekerabatan.
- 2) Memberikan gambaran kepada partai politik masih perlunya penguatan kaderisasi sesuai dengan AD/ART.

1.5 Sistematika Penulisan

Sebagai langkah untuk mendeskripsikan penelitian yang berjudul “**POLITIK DINASTI DAN KADERISASI PARTAI GOLONGAN KARYA PADA PILKADA PURWAKARTA TAHUN 2018**”, untuk itu penulis menerapkan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan sebagai bab pembuka yang terdiri dari beberapa sub-bab, yaitu: Latar Belakang Masalah; Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian; serta Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Pustaka yang dibagi menjadi sub-bab, yaitu: *Literature Review*, Teori dan Konsep yang digunakan sebagai pisau analisa penelitian; dan Kerangka Pemikiran.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini akan dibahas metodologi penelitian, yaitu yang berkaitan langsung dengan tempat dan waktu penelitian, setting lokasi penelitian, dan cara-cara apa yang digunakan guna membentuk analisa dalam pembahasan di BAB IV dan BAB V. Bab ini juga akan secara spesifik menjelaskan bagaimana metodologi penelitian yang digunakan berkaitan dengan pendekatan penelitian, penentuan informan, teknik pengumpulan data, teknis pengolahan dan analisis data, serta lokasi dan jadwal penelitian.

BAB IV GAMBARAN UMUM

BAB IV adalah BAB yang menjelaskan gambaran umum lokasi penelitian penulis, serta gambaran umum mengenai sejarah Pilkada di Kabupaten Purwakarta.

BAB V PEMBAHASAN

BAB Pembahasan adalah BAB yang akan mendeskripsikan hasil-hasil penelitian penulis dan hasil analisa penulis terkait dengan politik dinasti dan bagaimana sistem kaderisasi partai golongan karya di Kabupaten Purwakarta.

BAB VI

PENUTUP

Pada Bab terakhir dalam uraian penelitian ini adalah penutup yang merupakan hasil penelitian secara umum oleh penulis.

